

BAB II

DINAMIKA KERJASAMA INDONESIA DAN JEPANG

Pada bab II ini penulis akan memaparkan Hubungan Kerjasama Indonesia dan Jepang. Walau sejarah mencatat kisah suram penjajahan Jepang di Indonesia, pada tahun 1950an akhirnya Indonesia dan Jepang melakukan kerjasama bilateral hubungan bilateral Indonesia dan Jepang dimulai tahun 1958 yaitu dengan adanya perjanjian perdamaian antara Indonesia dan Jepang serta ditandatanganinya perjanjian sebagai bentuk ganti rugi yang diakibatkan Jepang di Indonesia pada masa perang dahulu. Kemudian Indonesia membuat kantor perwakilan di Tokyo dan dilanjutkan dengan penempatan konsulat Jendral sebagai langkah awal untuk mempermudah melakukan perundingan mengenai pemampasan perang tersebut tidak hanya itu saja pada tahun 1958 Indonesia dan Jepang banyak melakukan penandatanganan kerjasama serta penukaran nota yang isinya adalah mengatur masalah kerjasama dibidang ekonomi, pertanian, kehutanan, peningkatan produksi pangan, bidang social, dan budaya.

A. Sejarah Kerjasama Indonesia dan Jepang

Pada tahun 1958 Indonesia dan Jepang telah memulai hubungan diplomatik dan kerjasama bilateral di berbagai bidang, salah satu contohnya di bidang perdagangan kerjasama Indonesia dan Jepang ini dikokohkan dengan *Japan-Indonesian Economic Partnership Agreement* yang diberlakukan sejak 1 juli 2008 . JIEPA (*Japan-Indonesian Economic Partnership Agreement*) memebrikan kesempatan untuk

melakukan perdagangan ekspor-impor antara Indonesia-Jepang dengan tarif yang rendah¹⁶. Saat ini kedua Negara telah menjalin persahabatan yang sangat erat yang berlandaskan kerjasama dan pertukaran di berbagai bidang politik, ekonomi, budaya, transportasi, pendidikan dan sebagainya. Hubungan persahabatan seperti ini, bukanlah sesuatu yang bisa dibangun dalam sehari saja. Di Indonesia ada banyak orang Jepang entah itu untuk berlibur atau menetap untuk bekerja begitu juga sebaliknya ada banyak orang Indonesia yang berada di Jepang. Di Indonesia ada banyak perusahaan-perusahaan yang beroperasi dan jumlah perusahaan-perusahaan itu yang kurang lebih ada 1000 perusahaan dan kurang lebih 300.000 orang Indonesia dimana mereka bekerja di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia tersebut, tidak hanya itu di Indonesia terdapat kurang lebih 87.000 orang pelajar bahasa Jepang. Jumlah ini merupakan terbesar di Asia Tenggara dan menempati kedudukan ke-6 terbanyak di seluruh dunia.

Jepang memandang Asia sebagai pasar yang signifikan dan luas dengan prospek yang cerah bagi pertumbuhan di masa depan. Banyak Negara di wilayah tersebut telah berhasil melakukan transisi dari substitusi import ke ekonomi berorientasi ekspor, termasuk Indonesia yang mampu mengatasi krisis moneter pada kisaran tahun 1997-1998. Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan populasi terbesar ke-4 setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Indonesia mewakili pasar asing potensial apabila pertumbuhan ekonomi berkesinambungan dapat terwujud.

¹⁶ Lalu Rangers, Kerjasama Indonesia-Jepang, <http://www.slideshare.net/genokgagah/k-30117551> diakses pada 9 november 2016 pukul 22:00 WIB

Dengan alasan tersebut Jepang tertarik membantu Indonesia untuk menikmati kemakmuran, sementara Jepang mengambil keuntungan dari tingkat upah yang murah dan sumber daya alam yang besar. Disamping itu Jepang juga sangat berkepentingan menjaga pasokan energi yang stabil dan berkesinambungan.¹⁷

Posisi strategis Jepang tersebut selanjutnya mendorong Indonesia sebagai salah satu mitra penting dalam konteks diplomasi dan kerjasama bilateralnya, meskipun terdapat sensitifitas pribadi yang menodai sejarah antara kedua Negara tersebut.

Hubungan Bilateral kedua negara dibuka pada bulan 20 Januari 1958 dengan Penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara Jepang dan Republik Indonesia. Pada tahun yang sama ditandatangani pula Perjanjian Pampasan Perang. Komitmen yang dimiliki atas hubungan bilateral ini tentunya adalah persahabatan, kemajuan Negara dan kesejahteraan masyarakat dunia.

Dalam kerangka kerjasama regional ASEAN, Jepang merupakan salah satu mitra dialog utama dan anggota ARF (*ASEAN Regional Forum*). ARF (*Asean Regional Forum*) adalah merupakan suatu forum yang dibentuk oleh ASEAN pada tahun 1994 sebagai suatu wahana bagi dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan politik dan keamanan di kawasan, serta untuk membahas dan menyamakan pandangan antara negara-negara peserta ARF untuk memperkecil ancaman terhadap

¹⁷ F.Asikin, Hubungan Kerjasama Antara Indonesia dan Jepang “Economic Partnership Agreement (EPA)”, diakses pada 9 November pukul 22:00 WIB

stabilitas dan keamanan kawasan.¹⁸ Dan meskipun dalam suasana krisis Jepang tetap memandang Indonesia sebagai stabilisator di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama bilateral dalam rangka sister city/province saat ini juga semakin berkembang. Saat ini terdapat 6 sister city/province arrangements yang telah dikukuhkan dengan MOU yaitu Jakarta-Tokyo, Yogyakarta-Kyoto, Surabaya-Kochi, Medan-Ichikawa, Jawa Timur-Osaka Prefecture dan Irian Jaya-YamagataPrefecture. Bentuk kerjasama lain yang turut membantu pengembangan hubungan adalah keberadaan asosiasi-asosiasi persahabatan Indonesia – Jepang di berbagai prefektur di Jepang seperti Hiroshima, Kyushu, Okinawa, Ichikawa, maupun Tochigi¹⁹

B. Kerjasama Indonesia dan Jepang di bidang Ekonomi

Kerjasama bidang ekonomi antara Indonesia Jepang bisa dilihat dengan ada banyaknya perusahaan-peusahaan besar milik Jepang di Indonesia. Sementara Indonesia menempatkan banyak pekerja di Jepang,

Indonesia merupakan negara penerima ODA (bantuan pembangunan tingkat pemerintah) terbesar dari Jepang (berdasarkan realisasi netto pembayaran pada tahun 2005 adalah US\$1.22 milyar, yaitu \pm 17% dari seluruh ODA yang diberikan Jepang)

Selain itu, realisasi bantuan untuk tahun 2006 adalah :

¹⁸ KEMLU, ASEAN Regional Forum (ARF), <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/ARF.aspx> diakses pada 9 November 2016 pukul 22:00 WIB

¹⁹ Asta Qauliyah, Bentuk Kerjasama Bilateral Indonesia dan Jepang, diakses pada 9 november 2016 pukul 22:00 WIB

Pinjaman Yen : 125 Milyar Yen

Bantuan Hibah : 5,4 Milyar Yen

Kerjasama teknik : 7,8 Milyar Yen

Setelah mulainya pemerintahan Yudhoyono, telah dibentuk forum Investasi bersama tingkat tinggi pemerintah-swasta antara Jepang dan Indonesia. Berdasarkan saran dan dialog yang sejak dulu diadakan antara Japan Club dan pemerintah Indonesia, pada bulan Juni 2005 pada kesempatan kunjungan Presiden Yudhoyono ke Jepang, telah berhasil disetujui SIAP, yaitu rencana strategis investasi yang meliputi 5 pokok, yaitu masalah bea, customs, tenaga kerja, infrastruktur dan daya saing.

Perundingan resmi “Economic Partnersip Agreement antara Indonesia dan Jepang (EPA)” disetujui oleh pemerintah Indonesia dan Jepang pada waktu Presiden SBY berkunjung ke Jepang dengan resmi pada bulan Juni 2005, setelah itu Presiden SBY dan Mantan Perdana Menteri Jepang, Mr.Abe menandatangani surat persetujuan EPA pada tgl 20 Agustus 2007. Melalui EPA yang telah berlaku efektif dan mulai diimplementasikan pada tanggal 1 Juli 2008 ini, diharapkan perdagangan dan investasi antara kedua Negara dapat meningkat dan semakin berkembang.

Pada bulan November 2004 disela-sela pertemuan APEC Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe

sepakat untuk membahas pembentukan *EconomicPartnership Agreement (EPA)*. Pembicaraan itu dilanjutkan dengan pembicaraan antara menteri perdagangan Indonesia dan Jepang pada bulan desember 2004. Jepang masih merupakan mitra penting Indonesia dalam 40 tahun belakangan ini dan mitra dagang terbesar dalam 5 tahun terakhir yang nilai perdagangannya tumbuh 14,4% dengan EPA Indonesia akan berupaya meningkatkan iklim investasi dalam negeri sehingga bisa memungkinkan kerjasama Indonesia-Jepang yang lebih kuat di berbagai bidang seperti investasi, energy dan perdagangan.

Sebagai langkah awal adalah diadakannya Joint Study, melalui Joint Study Group Meeting (JSG) sebanyak 3 kali pertemuan informal (Desember 2004-Juli 2005). Hasil JSG merekomendasi manfaat perlunya EPA antara kedua negara berupa Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA), yang kemudian diikuti dengan seri perundingan/negosiasi sebanyak 6 (enam) putaran sejak Juli 2005 sampai dengan November 2006. Sementara itu, PM Abe juga mengatakan bahwa EPA merupakan wujud nyata peningkatan kerjasama kedua negara yang diharapkan bisa menyumbangkan peningkatan kerjasama di semua bidang.

Beberapa alasan yang mendasari Indonesia untuk menjalin kerjasama melalui EPA (*EconomicPartnership Agreement*) dengan Jepang, diantaranya adalah:

1. Jepang merupakan mitra dagang dan investor utama buat Indonesia, dan Indonesia adalah penerima terbesar *ODA(Officical Development Assistance)* Jepang;

2. Akses Pasar untuk produk Indonesia ke pasar ekspor terbesar mewakili 20% dari ekspor yang ada, sedangkan Jepang merupakan sumber impor terbesar kedua bagi Indonesia (13%);
3. Peluang untuk mengirim tenaga kerja semi terampil;
4. EPA(*Economic Partnership Agreement*) memberi kepastian akses pasar yang lebih preferensial dan luas dibandingkan dengan program seperti *Generalized System of Preferences* (GSP), dan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara lain yang telah memiliki perjanjian dengan Jepang seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand di ASEAN; sedangkan Brunei dan Vietnam menyusul.

Tidak seperti perjanjian perdagangan bebas sebelumnya, IJ-EPA merupakan kerjasama perdagangan yang mencakup tidak hanya LIBERALISASI, namun juga sektor lainnya, antara lain jasa, investasi, energi dan sebagainya, yang tercakup dalam TIGA PILAR utama yaitu :

- a. Fasilitasi Perdagangan dan investasi :
 1. Upaya bersama untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan tingkat kepercayaan bagi investor Jepang;
 2. Kerjasama di bidang prosedur kepabeanan, pelabuhan dan jasa-jasa perdagangan, HKI, standar;

- b. Liberalisasi: menghapuskan/mengurangi hambatan perdagangan dan investasi (bea masuk, memberi kepastian hukum);
- c. Kerjasama: kesepakatan untuk kerjasama dalam meningkatkan kapasitas Indonesia sehingga lebih mampu bersaing dan memanfaatkan secara optimal peluang pasar dari EPA.

IJ-EPA merupakan kerjasama yang komprehensif dan lebih memberikan peluang daripada kesepakatan dalam WTO, sehingga sering disebut dengan WTO PLUS. Untuk mengakomodasi ke-komprehensifan dan memperlancar jalannya perundingan, maka IJ-EPA mengelompokkan perundingan ke dalam 13 Expert Groups (EG), yaitu:

1. Perdagangan Barang
2. Prosedur Kepabeanan
3. Aturan Asal
4. Investasi
5. Peningkatan Lingkungan Bisnis & Promosi Bisnis Keyakinan
6. Perdagangan Jasa
7. Gerakan Orang Alam

8. Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
10. Kebijakan Persaingan
11. Kerjasama Teknis dan Pembangunan Kapasitas
12. Ketentuan Umum
13. Pengadaan Pemerintah

Beberapa keuntungan dan manfaat yang akan diperoleh Indonesia dengan adanya perjanjian kerjasama IJ-EPA

- a. Kemitraan dalam EPA menggambarkan kepentingan dari dua Negara yang mengikatkan diri
- b. Manfaat dari EPA : di bidang perdagangan, barang dan jasa, investasi, bisnis meningkatkan kapasitas bagi Indonesia :
- c. Elemen utama EPA yang penting bagi Indonesia adalah peningkatan akses ekspor Indonesia ke Jepang

Dengan diberlakukannya perjanjian kerjasama IJ-EPA ini Indonesia akan memperoleh beberapa keuntungan dan manfaat.

Pertama, IJ-EPA dapat menjadi wujud nyata aplikasi kemitraan yang komprehensif. Kemitraan dalam IJ-EPA menggambarkan kepentingan dari kedua

negara yang mengikatkan diri. Indonesia dan Jepang akan lebih dapat menggali potensi untuk meningkatkan kepentingannya agar dapat terakomodasi didalam IJ-EPA tersebut.

Kedua, kerjasama perjanjian IJ-EPA memiliki manfaat dan berdampak pada berbagai sektor. Di bidang perdagangan, Indonesia mampu meningkatkan arus barang dan jasa ke Jepang. Peningkatan ekspor impor ini akan mampu mendongkrak devisa Negara yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Negara. Disamping itu, Indonesia akan diuntungkan dengan peningkatan investasi yang dating dari Jepang. Hal ini akan menggerakkan bisnis didalam negeri. Dan tentunya, adanya transver teknologi menjadi keuntungan yang tidak dapat dipungkiri Indonesia. Dengan adanya transfer teknologi ini akan mampu meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang juga dapat meningkatkan kapasitas bagi Indonesia. Peningkatan kapasitas yang dimaksud seperti area standardisasi produk dan pengujian, kebersihan dan standar kesehatan untuk produk makanan dan minuman, Pelatihan ketrampilan dan teknologi di sektor manufaktur yang akan meningkatkan mutu produk Indonesia di pasar domestik dan internasional.

Ketiga, keuntungan dengan adanya IJ-EPA ini tidak hanya akan dirasakan kalangan elit pemerintah. Namun, kerjasama komprehensif ini akan meningkatkan “tetesan ekonomi” yang dapat dirasakan masyarakat seluruh lapisan. Penggerak roda ekonomi sebagian besar ditopang dari sektor UKM. Dengan adanya perjanjian IJ-

EPA akan menjadi batu loncatan bagi para UKM di Indonesia dalam meningkatkan produktivitasnya.

C. Kerjasama Indonesia dan Jepang di bidang Infrastruktur

Indonesia dan Jepang sepakat melanjutkan kerja sama di bidang pengembangan infrastruktur. Kesepakatan tersebut tertuang dalam nota kesepahaman antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Menteri Pertahanan, Infrastruktur, Transportasi serta Pariwisata Jepang di Jakarta pekan lalu.

Menteri Pertahanan Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang Keiichi Ishii menyatakan, kerja sama tersebut merupakan lanjutan kerja sama yang telah berlangsung sejak 2013. Harapannya agar ke depan kerja sama dalam pertukaran pengalaman dan pengetahuan di bidang infrastruktur dapat terus berlanjut,” ungkap Keiichi.

Dalam kerja sama tersebut, diharapkan ada transfer pengetahuan berupa pengalaman dan informasi yang berkaitan dengan sektor infrastruktur. Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono mengungkapkan, kerja sama ini merupakan lanjutan dari tahun 2013-2016, dan diperbarui hingga 2019. Dia menambahkan, salah satu isu yang disorot dalam pertemuan tersebut adalah proyek pengelolaan sistem air limbah DKI Jakarta. Menurut Basuki, pada 2011 Jepang melalui *Japan International Cooperation Agency*

(JICA) telah melakukan studi yang merekomendasikan pengembangan sistem air limbah agar terbagi ke dalam 14 zona, dua di antaranya akan didanai oleh Jepang²⁰.

Indonesia-Jepang menargetkan implementasi proyek kerja sama pengembangan infrastruktur kawasan Jabodetabek, yang dimulai pada 2013, dengan nilai investasi 2 triliun yen atau sekitar US\$20 miliar.

Proyek itu bagian dari kesepakatan kerja sama proyek area prioritas metropolitan (metropolitan priority area/MPA), yang nantinya juga melibatkan sejumlah kota di antaranya Medan, Surabaya, dan Makassar.

Kerja sama lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut terkait penanganan pantai di Bali, yang kualitasnya menurun dalam beberapa dekade terakhir akibat erosi. Basuki menyebutkan adanya kesamaan kondisi geografis antara kedua negara sebagai salah satu alasan di balik kerja sama di sektor konservasi pantai. Basuki mengapresiasi Proyek Konservasi Pantai Bali Fase I yang didukung Jepang dan telah selesai pada tahun 2008 tersebut.

“Bali Beach Conservation Fase 1 sudah sangat berhasil, baik dari segi teknologi dan lingkungan. Penanganannya tidak hanya dari penerapan teknologi untuk menangani abrasi pantai tapi juga memperhatikan lingkungan untuk memelihara terumbu karang,” ungkap Basuki. Dia juga berharap, fase kedua dapat

²⁰ Jurnal, RI-JEPANG Lanjutkan Kerja sama Infrastruktur, diakses pada 5 desember 2016

dilakukan dengan pendekatan yang sama sehingga daya tarik pantai di Bali yang terkenal keindahannya sebagai tujuan wisata tidak hilang. Hal lain yang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut adalah Undang-Undang (UU) Jasa Konstruksi yang baru disahkan DPR pada 15 Desember 2013 lalu.²¹

Pada kesempatan tersebut, Basuki menyampaikan perkembangan terbaru tentang penerbitan izin bagi perusahaan jasa konstruksi asing seperti diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No 30/ 2016 yang diamanatkan oleh UU Jasa Konstruksi yang baru.

“Ada sejumlah penyederhanaan proses, serta pada saat yang sama melindungi pula perusahaan jasa konstruksi nasional. UU Jasa Konstruksi baru juga mengatur perusahaan jasa konstruksi asing di Indonesia untuk menempatkan salah satu direksinya dari orang Indonesia,” pungkask Basuki.

Hal itu diungkapkannya se usai menanda tangan nota kesepahaman MPA antara dirinya selaku Menko Perekonomian dan Menlu Jepang Sieji Maihara di Nusa Dua, Bali, Jumat, pekan lalu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hadir menyaksikan penandatanganan MoU itu didampingi Dubes RI untuk Jepang M. Lutfi dan sejumlah anggota kabinet Indonesia Bersatu II, seperti Menperin MS Hidayat dan Menlu Marty Natalegawa. Hatta mengungkapkan sejumlah proyek yang digarap dalam kerangka kerja sama itu,

²¹ ibid

yaitu mass rapid transportation (MRT), pelabuhan laut dan udara baru, jalan tol, jaringan air bersih dan ketenagalistrikan di kawasan Jabodetabek. Hal itu, tuturnya, bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas kawasan itu sebagai zona ekonomi dan manufaktur utama di Indonesia.

“Kami akan menggunakan teknologi Jepang yang terbukti unggul selama ini untuk pengerjaan proyek tersebut.” Selain itu, Hatta mengatakan dalam pembahasan di Jepang yang diikutinya beberapa waktu yang lalu bersama Wapres Boediono disiapkan pula proyek pengembangan infrastruktur untuk koridor ekonomi Sumatra dengan nilai mencapai US\$52,9 miliar.

Menurut dia, pengembangan infrastruktur koridor ekonomi Sumatra itu diperlukan untuk mempercepat pengembangan ekonomi pulau itu dan dibuat terintegrasi dengan infrastruktur ekonomi koridor Jawa.²²

Dia menjelaskan pola pengembangan MPA itu ditempuh dengan mengombinasikan pola pembiayaan kerjasama pemerintah swasta (PPP), investasi asing langsung (FDI), dan ODA. Sementara itu, Menlu Jepang mengatakan pihaknya berkomitmen penuh untuk terlibat dan mendukung proyek tersebut. Dalam hal ini, tuturnya, Pemerintah Jepang sudah sepakat mengembangkan proyek kereta api, air bersih, listrik dan pelabuhan.

²² PT.SMi, RI dan Jepang garap infrastruktur US \$ 20 Miliar, diakses pada 5 Desember 2016

Sebagai bentuk tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di Jepang beberapa waktu yang lalu, Menteri Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang Akihiro Ohta kembali menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Indonesia Hatta Rajasa hari ini.

Akihiro menjelaskan, pertemuan kali ini membahas sejumlah wacana mengenai kerja sama Jepang dengan Indonesia di sektor infrastruktur meski enggan membeberkan poin-poin apa saja yang masuk dalam pembahasan tersebut, Akihiro mengungkapkan sudah mendapatkan kesepakatan untuk meningkatkan atau menindaklanjuti kerjasama di infrastruktur ini.

Akihiro mengakui, pemerintah Jepang saat ini sudah siap memberikan dukungan, seperti teknologi dalam rangka menindaklanjuti kerja sama dengan Indonesia dalam hal pembangunan infrastruktur tersebut.

"Karena ini tingkat menteri jadi tidak dibahas secara detail. Tapi intinya, kedua menteri ada kesepakatan infrastruktur di Indonesia dan kami dari Jepang dalam berbagai hal termasuk masalah teknologinya," tutur dia²³

Kerjasama transportasi laut, udara dan kereta api antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang terus meningkat dari tahun ke tahun. Melalui JICA (*Japan International Cooperation Agency*) , berbagai kerjasama dan bantuan telah berhasil dilaksanakan di Indonesia yang bertujuan mendorong pelaksanaan berbagai proyek

²³ Dana Aditiasari, Ri-Jepang menindaklanjuti kerja sama infrastruktur, diakses pada 5 desember 2016

pembangunan pada tingkat masyarakat berbagai negara berkembang yang diprakarsai oleh berbagai mitra pembangunan Jepang (khususnya lembaga swadaya masyarakat atau LSM, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi) yang memiliki teknologi dan pengalaman dalam pembangunan. Kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jepang itu akan dapat mengurangi *Backlog* (ketertinggalan) dan *Bottleneck* (hambatan) di bidang transportasi. Pemerintah Indonesia dalam 5 (lima) tahun ke depan akan membutuhkan dana sebesar 26 miliar dolar Amerika Serikat untuk pembangunan infrastruktur di sektor transportasi. Seperti diketahui, Pemerintah tengah merencanakan pembangunan pelabuhan Patimban, Jawa Barat yang pembangunannya akan menggunakan pinjaman lunak dari Pemerintah Jepang melalui JICA. Keberadaan Pelabuhan Patimban diharapkan dapat terintegrasi dengan Pelabuhan Utama Tanjung Priok dalam rangka meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia, Jepang sangat tertarik dengan pengembangan kereta api sebagai sarana transportasi masal yang ampuh menekan kemacetan yang saat ini mulai menjadi polemik untuk negara berkembang seperti Indonesia. Beberapa rute perjalanan akan segera lakukan pembangunan dalam tahapan yang berbeda. Jepang akan mamulai aksi pembangunan pertama untuk wilayah tempuh Jakarta Surabaya. selama ini Indonesia dan Jepang sudah empat tahun bekerja sama dalam pengambangan sistem transportasi terutama kereta api masal yang mampu angkut banyak penumpang. Kabarnya biaya pembangunan kereta api cepat ini akan menelan sejumlah 400 Milyar Rupiah. Nantinya jalur kereta api ini masih akan mencari solusi

terbaik dari dua jalur yang akan lewati tiga kota atau empat kota. Jalur pertama Jakarta menuju Cirebon langsung Surabaya dan kedua Jakarta menuju Bandung kemudian Cirebon hingga Surabaya. Selain meminjamkan dana triliunan rupiah, Japan International Cooperation Agency (JICA) menyatakan komitmennya untuk menjadi konsultan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta. Dalam komitmen kerja sama tersebut, MRT Jakarta akan meniru MRT Tokyo yang terintegrasi dengan daerah-daerah sekitar kota, Jakarta memang sangat membutuhkan sarana transportasi massal seperti MRT. Selain dapat mengurangi polusi udara, transportasi seperti MRT juga bisa mengurangi kemacetan.

Seperti diketahui, Indonesia dapat pinjaman Rp 15 triliun dari JICA untuk pembangunan MRT Lebak Bulus-Bundaran HI. Dari dana itu, sebesar 49% ditanggung pemerintah pusat dan 51% ditanggung Pemprov DKI. Tahap I yang akan dibangun terlebih dahulu menghubungkan Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI sepanjang 15,7 km dengan 13 stasiun (7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah) ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2016. MRT tahap I Lebak Bulus-Bundaran HI, koridor utara-selatan, jalur MRT terdiri dari 13 stasiun MRT. Yaitu sebanyak 7 stasiun sepanjang 7 Km berada di atas (elevated/layang) yaitu stasiun Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Sementara itu 6 stasiun sepanjang 6 km berada di bawah tanah yaitu Bundaran Senayan, Istora, Benhil, Setiabudi, Dukuh Atas, Bundaran HI.